

**FAKTA TAK TERLIHAT
POSISI PEREMPUAN DALAM KONFLIK
SOSIAL DI MALUKU**

Julius Lawalata

Ayam hitam telurnya putih
Mencari makan di pinggir kali
Nona Ambon giginya putih
Kalau tertawa manis sekali.

Kata-kata sederhana ini merupakan salah satu syair yang sering dinyanyikan pemuda Maluku untuk menggambarkan rasa suka kepada perempuan dalam tiap kesempatan, dalam kehidupan sosial di seantero negeri di Maluku, terutama di Pulau Ambon dan Lease (Kepulauan Haruku, Saparua, Nusalaut). Syair seperti ini bukanlah tanpa arti karena secara langsung mendudukan posisi perempuan Maluku (gadis atau ibu) setara dengan ekspresi cinta orang Maluku kepada negeri, rasa bangga akan kekayaan alamnya maupun dengan tradisi dan budaya, yang banyak ditemui dalam syair lagu-lagu daerah Maluku.

Satu kenyataan yang nyaris tidak diungkap sama sekali adalah bahwa perempuan Maluku, terutama di Pulau Ambon dan Lease, memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tengoklah di Fakultas Teologia Universitas Kristen Indonesia Maluku puluhan calon perempuan dipersiapkan menjadi pemimpin (Pendeta).¹ Di beberapa negeri (desa) perempuan dipilih sebagai Raja atau kepala desa. Di kepulauan Lease pengambilan keputusan-keputusan penting, misalnya dalam hal pendidikan anak, di kebanyakan keluarga sangat memperhitungkan saran dan sikap perempuan (ibu). Hal ini disebabkan oleh dua hal mendasar; perempuanlah yang menghasilkan pendapatan utama bagi keluarga (guru, pedagang *papalele*) sekaligus sebagai manager keuangan keluarga. Posisi perempuan Maluku sangat ditentukan oleh *setting* sosial masyarakat yang relatif terbuka dan egaliter. Di daerah Maluku Tenggara (Kepulauan Kei) yang relatif patriarki pada khususnya, eksistensi perempuan tidak dinafikan, tetapi menjadi sentral dalam mengatur dan menata hubungan antar manusia bahkan dengan alam.²

Tulisan ini bermaksud untuk menggambarkan posisi dan peran kaum perempuan di Maluku dalam upaya rekonsiliasi dan pencegahan konflik sosial baru. Dua kasus yang relatif berbeda digambarkan dalam tulisan ini: aktifitas perempuan di Maluku Tengah dalam menghidupi keluarga selama konflik berlangsung (terutama berdagang) dan kedudukan terhormat kaum perempuan di kepulauan Kei, ampuh dalam mendorong proses rekonsiliasi konflik sosial yang berkepanjangan di Maluku.

Konflik Sosial Maluku dan Upaya Rekonsiliasi

Tanpa bermaksud mengulas kembali kronologis terjadinya konflik di Maluku yang sudah dipublikasikan oleh banyak media, dalam paparan ini penulis merasa penting untuk menjelaskan beberapa hal dengan alasan bahwa "rekonsiliasi tidak akan pernah ada tanpa diawali dengan konflik". Singkatnya, tidak lebih dari 72 jam, terjadi perubahan isu yang menyertai perkembangan konflik di Maluku, terutama di Pulau Ambon. Perubahan ini sekaligus mempertajam dan memperlebar eskalasi konflik, termasuk menarik dan memisahkan orang-orang di Maluku menurut kategori tertentu.

Pada tanggal 19 Januari 1999, selesai Sholat Idul Fitri di Lapangan Merdeka Ambon, di antara kesibukan orang Muslim di Maluku dan

persiapan saudara, teman kerja, pacar bahkan istri dan suaminya yang Kristen untuk mengucapkan "Selamat Idul Fitri" di Batu Merah, Mardika, Tulehu, Waihaong, Galunggung, Pohon Pule dan Ponegoro, terjadi insiden kecil antara seorang supir dan seorang pemuda di jembatan Batu Merah-Mardika.

Insiden ini disertai dengan pelemparan batu dan pembakaran. Ini peristiwa yang tidak wajar karena selain melibatkan banyak orang, juga tindakan pembakaran rumah-rumah sekitar arena konflik.³

Tiga jam setelah insiden itu, isu yang berkembang adalah



Dok.YJP

konflik antar suku (ras) Maluku melawan BBM (Buton, Bugis, Makasar). Isu ini bertahan kurang lebih 48 jam. Dalam interval waktu yang sama, sudah terjadi pembakaran rumah ibadah di lokasi Silale. Hal ini tidak begitu berpengaruh. Walaupun demikian mulai terjadi gelombang pengungsi secara bergerombol dan sporadis yang rata-rata berlindung di rumah-rumah orang Maluku asli.

Tepat tanggal 23 Januari 1999, ketakutan orang Maluku akan munculnya konflik agama pun terjadi. Cukup dengan tersebarnya informasi sesat "Mesjid Al-Fatah, Mesjid Raya di Ambon, terbakar" maka ribuan orang berpakaian putih-putih dari Jazirah Leihitu, sambil meneriakkan "Allahu Akbar" membakar rumah-rumah sepanjang Benteng Karang, Hunuth, Waiheru, Negeri Lama dan Nania, mereka terprovokasi. Tiga markas militer di Waiheru luput dari pembakaran. Sejak itu, dua warna menjadi pembeda masyarakat di Maluku berdasarkan agama. Merah adalah Kristen dan putih adalah Islam. Arus pengungsian orang Maluku di dalam maupun ke luar Maluku mencapai puluhan ribu orang, tidak terelakkan. *I kang makang ikang.*

Dengan demikian, sangatlah jelas episode konflik Maluku yang

dimulai dengan isu kriminal murni, dinaikkan eskalasinya menjadi isu konflik antar suku dan bermuara pada konflik agama. Luar biasa!

Membengkaknya Pengungsi

Konflik horizontal yang terjadi di awal tahun 1999 di Ambon memang mengisyaratkan tentang tragedi kemanusiaan. Ribuan nyawa melayang dan banyak penduduk yang harus kehilangan tempat tinggal, harta dan keluarga. Hanya dalam waktu satu tahun, pertikaian antar kelompok warga yang berbeda agama secara sporadis di berbagai wilayah, bahkan pulau, sampai ke Haruku, Saparua, Masohi, Tual, Dobo, Banda, Buru, Temate-Tidore, Halmahera dan Morotai terjadi.

Konflik ini sangat bertentangan dengan sebutan "bumi seribu pulau" yang selama ini dikenal dunia sebagai kawasan damai, tentram dan toleran, yang kini menjadi neraka. Penduduk terpaksa harus meninggalkan kediamannya menuju daerah yang bagi mereka aman, untuk melanjutkan kehidupan, terutama hidup sebagai pengungsi.

Menurut Ade Latifa, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tercatat 276.446 orang terpaksa mengungsi meneruskan hidupnya di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di lima provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.⁴

Di daerah pengungsian, mereka hidup dengan segala keterbatasan, terlihat dari kondisi tempat tinggal yang sangat buruk serta kurangnya pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Keadaan ini memaksa berbagai pihak untuk memberi bantuan agar pengungsi dapat mempertahankan kelangsungan hidup selama di pengungsian. Dari pengalaman ini, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat penanganan pengungsi melalui tiga pola, yaitu pemulangan, pemberdayaan dan relokasi atau pengalihan. Rumitnya semua persoalan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga sebagian besar dana yang diperlukan untuk melaksanakannya juga berasal dari pemerintah pusat tidak bisa dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Konflik yang menyebar di Maluku menimbulkan pengungsi yang jumlahnya cukup besar. Pengungsian terbesar terjadi di daerah Provinsi Maluku Utara. Data yang diperoleh dari Satkorlak PBP Maluku Utara memperlihatkan bahwa pengungsi tersebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Pengungsian tidak hanya terjadi antar kabupaten, tetapi

juga antar kecamatan dan antar desa. Jumlah pengungsi yang terdapat di dalam Provinsi Maluku Utara yang tercatat sampai dengan tahun 2002 adalah 248.531 jiwa dan sebagian besar berada di Kabupaten Maluku Utara).⁵ Seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel Penyebaran Pengungsi di Provinsi Maluku Utara

Daerah Pengungsi	Jumlah Pengungsi	
	Kepala-Keluarga	Jiwa
Maluku Utara	31.095	132.571
Jailolo	5.087	21.087
Sahu	1.539	6.314
Ibu	850	3.645
Loloda	2.711	10.451
Gane Barat	819	4.367
Gane Timur	2.015	7.736
Morotai Selatan	1.604	7.385
Morotai Utara	1.072	4.970
Galela	2.235	10.527
Tobelo	7.164	27.695
Kao	973	4.385
Makian/Malifut	1.242	7.216
Kayoa	420	2.156
Bacan	1.417	6.714
Obi	1.710	6.624
Sanana	237	1.299
Halmahera Tengah	4.101	22.105
Pulau Tidore	397	1.971
Tidore Utara	323	1.516
Tidore Selatan	184	1.095
Oba	89	550
Oba Utara	217	2.808
Weda	487	2.980
Patani	291	1.498

Sumber: Hasil Penelitian Mita Noveria dalam buku *Pengungsi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara Upaya Penanganan Menuju Kehidupan Mandiri*, 2003.

Konflik Maluku dan Perempuan

Agama, tingkat pendidikan, status sosial, budaya dan bahasa di setiap tempat pasti berbeda; tetapi keadaan dan dampak konflik bersenjata bagi perempuan di

tiap abad dan segala tempat adalah sama. (Julius Lawalata)

Memang sangat sulit melepaskan eksistensi perempuan dari pembicaraan tentang dampak konflik bersenjata (baca; perang) baik dalam skala lokal (daerah), nasional maupun internasional. Perang di Timor Timur secara jelas menunjukkan bahwa perempuan di tempat-tempat pengungsian sangat rentan terhadap *kekerasan ekonomi*: ketika bantuan kemanusiaan tidak cukup, pengungsi perempuanlah yang pertama menghadapi beban kerja untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarganya. Ada yang memiliki kios di pinggir kamp di mana mereka menjual sedikit sayur, buah-buah atau makanan kecil yang mereka masak sendiri. Ada juga yang memperoleh uang dengan mencuci pakaian atau mengemis dari rumah ke rumah di Belu dan TTU. Bahkan ada pengungsi perempuan yang menjadi pekerja seks komersial di beberapa lokasi prostitusi di Atambua.⁶

Pengungsi perempuan juga rentan terhadap *kekerasan kesehatan* yang antara lain disebabkan oleh kondisi kamp yang kurang layak. Ada pengungsi perempuan yang terpaksa memakai air dari mana saja, bahkan dari got, untuk segala kebutuhan air keluarganya. Kekerasan kesehatan perempuan juga terasa di mana MCK tidak cukup atau tidak dipakai dengan semestinya. Akibatnya mereka terserang banyak penyakit menular. Apalagi pelayanan medis yang sangat minim. Dalam kamp-kamp besar tidak ada kepekaan sama sekali terhadap kebutuhan khusus perempuan yang sedang menstruasi, hamil atau baru melahirkan serta menyusui. Perempuan ini yang paling rentan terhadap kekurangan makanan. Ada ibu-ibu hamil yang menderita kekurangan gizi sehingga kondisi tubuhnya sangat lemah dan pucat. Ketika kelaparan meningkat, terjadi kematian pada balita, orang pertama yang paling tertekan secara psikologi adalah sang ibu.⁷

Pengungsi perempuan juga terkena *kekerasan sosial*. Beberapa perempuan pernah ditempatkan dalam sebuah barak yang penuh dengan laki-laki. Hanya sepotong kain tipis yang memisahkan mereka dari mata laki-laki. Mereka tidak memiliki tempat pribadi untuk sekadar berganti pakaian atau mengurus hal-hal pribadi. Banyak tempat tinggal bagi perempuan di kamp cukup terbuka sehingga garis di antara ruang

privat dan ruang umum hampir tidak ada lagi. Bagi perempuan yang hidup dalam kondisi kotor dan padat, gabungan ruang privat dan umum dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan fisik terhadapnya.⁸

Sebagaimana daerah konflik di tempat lainnya, Tabrani Yunis dalam makalahnya yang berjudul *Petaka Bagi Perempuan: Pemahaman Baru Konflik Politik Bersenjata di Aceh*, menjelaskan bahwa konflik Aceh adalah sebuah cermin bagi kita betapa politik dan konflik bersenjata di Aceh telah dan serta merta menyeret kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa ke dalam kancah politik dan perang yang hampir sepenuhnya, tak mereka pahami ujung-pangkalnya. Dan, ketidapkahaman mayoritas kaum perempuan, terutama dari kalangan dan lapisan jelata awam terhadap persoalan-persoalan politik yang sering memicu konflik bersenjata itu pada hakekatnya diakui atau tidak adalah hasil dari "peradaban kaum laki-laki". Tabrani juga mempertanyakan bahwa berapa banyak kaum perempuan yang terlibat dalam proses-proses paling menentukan ketika keputusan harus diambil: perang atau damai? Siapakah yang mengambil keputusan-keputusan menentukan di Banda Aceh, Jakarta, Stockholm, Jeneva dan Davos?

Dampak konflik di Timor Timur dan Aceh terhadap perempuan seperti yang dijelaskan di atas tidak lebih sama dengan yang dialami oleh perempuan di Maluku. Selain yang sudah dijelaskan, dari data Tim Relawan Kemanusiaan-Jaringan Baileo Maluku, sejak tahun 2001 menunjukkan bahwa sekitar 75% korban konflik di Maluku adalah perempuan dan anak-anak. Banyak di antara mereka yang bukan sekadar korban tak langsung dari konflik, melainkan juga korban langsung berbagai tindakan kekerasan selama dan sesudah konflik, antara lain korban pelecehan seksual atau bahkan perkosaan. Banyak juga yang melakukan hubungan seksual dengan aparat keamanan atas dasar suka sama suka. Masalahnya adalah mereka, banyak yang sudah hamil, akhirnya ditinggal begitu saja ketika oknum aparat itu meninggalkan Ambon karena masa tugas satuannya di sana sudah selesai.⁹ Mereka inilah yang sangat populer di kalangan masyarakat luas dengan sebutan 'KORAMIL' (Korban Rayuan Militer), memplesetkan istilah resmi militer sendiri (Komando Rayon Militer).¹⁰

Rekonsiliasi Elit

Secara umum, proses penyelesaian kasus Maluku melibatkan banyak pihak, juga menghabiskan dana yang sangat besar. Dialog antar tokoh agama, seminar dan lokakarya untuk perdamaian Maluku, publikasi media tentang seruan perdamaian bahkan forum-forum pertemuan seperti Forum *Baku Bae* atau pertemuan Malino II yang semuanya itu dilakukan di Bali, Jawa, Sulawesi dan Maluku atau di luar negeri menunjukkan dengan jelas bahwa semua orang prihatin (*concern*) dengan persoalan Maluku. Sayangnya yang dilibatkan hanyalah orang-orang yang dianggap tokoh di dua komunitas, baik sipil maupun militer, oleh pemrakarsa pertemuan. Akibatnya, agenda-agenda pertemuan yang dihasilkan atau ide rekonsiliasi yang disampaikan tidak bisa diimplementasi karena tidak mengakar pada harapan dan cara penyelesaian konflik yang diinginkan oleh masyarakat bawah (*grass root*) di Maluku. Dengan begitu, tidaklah heran kalau ada anggota masyarakat, Muslim ataupun Nasrani, yang mengeluarkan pernyataan bahwa "*dorang sandiri yang bikin akan, bakunipul par kasi abis kepen juta-juta lalu pukul dada, deng angka diri sandiri*" (Mereka yang bikin rusuh, berkumpul untuk habiskan uang jutaan rupiah, lalu memuji diri sendiri).

Hal ini juga dengan jelas mengindikasikan bahwa sejak terjadinya konflik, para pihak yang dianggap dan atau menganggap dirinya tokoh, tidak bisa melakukan apapun karena tidak didengar oleh masyarakat bawah, baik di komunitas Muslim maupun Nasrani. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa semua pertemuan merupakan rekonsiliasi elit yang kala itu dianggap cara ampuh meredam dan menghentikan konflik di Maluku.

Fakta Tak Terlihat

Terlepas dari fakta kebanyakan bahwa perempuan mendapat dampak negatif akibat perang maupun konflik sosial seperti dipaparkan di atas, perempuan juga memegang peran penting dalam upaya rekonsiliasi maupun pencegahan konflik baru seperti yang terjadi di Maluku. Banyak perempuan melibatkan diri secara sukarela baik individu maupun kelompok dari berbagai tingkatan, dalam berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan selama konflik maupun pasca-konflik.

Telah banyak pakar yang melakukan analisis tentang konflik yang terjadi di Maluku. Tanpa mengurangi kesahihan analisis yang dimaksud, saya ingin mengemukakan beberapa muara analisis dari dua perempuan yang “bukan pakar” dan tidak terkenal, bahkan jauh dari popularitas. Mereka adalah Lely Imoliana dan Lela Suad. Lely Imoliana adalah seorang relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Tim Relawan Kemanusiaan-Jaringan Baileo Maluku yang menyimpulkan bahwa “satu hal yang pasti, konflik sosial yang melanda Maluku sangat sarat dengan peran dan keterlibatan unsur-unsur kepentingan elit politik lokal serta aparat militer di dalam setiap episode konflik.” Imoliana menyimpulkan tentang adanya sebab-sebab eksternal yang melanggengkan konflik. Hal ini sangat berbeda dengan kesimpulan Lela Suad, seorang ibu rumah tangga, yang menyatakan bahwa, “konflik maluku muncul akibat semakin mudarnya nilai-nilai adat tradisonal orang Maluku”. Lebih jauh, Suad menjelaskan bahwa proses pemaksaan nilai-nilai luar –dan baru- menggeser nilai-nilai asli orang Maluku sehingga mengubah tata keteraturan masyarakat Maluku terutama berkaitan dengan hak kepemilikan ekonomi, bentuk-bentuk solidaritas masyarakat, dan akses terhadap sumber daya alam. Singkat kata, dalam proses dan waktu yang sangat lama orang Maluku mengalami krisis jati diri, yaitu gabungan antara kehilangan landasan pijak atau tempat bergantung dengan perasaan ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang penuh ketidakpastian dari proses transisi yang sedang berlangsung.¹¹

Apapun analisis yang dikemukakan, konflik yang terjadi ini berdampak pada kehidupan orang-orang di daratan Maluku di mana mereka mengalami krisis, baik material maupun imaterial.

Perempuan: *The Real Survivor and Reconciliator*

Siapakah yang paling banyak berhubungan dengan urusan belanja rumah tangga? PEREMPUAN. Sangat sulit menjelaskan proses rekonsiliasi alami yang dipelopori oleh perempuan ketika konflik Maluku berlangsung. Selain tidak pernah diperhitungkan karena mereka dianggap biasa bahkan ‘sepi’ oleh banyak pihak, para pelakunya adalah orang-orang biasa yang notabene juga korban utama dari konflik tersebut. Korban mestinya dipenuhi kebutuhannya, dilindungi dan tidak perlu melakukan sesuatu untuk mencegah munculnya korban baru. Kira-

kira begitulah anggapan banyak pihak ketika menjumpai seorang perempuan berbelanja di pasar-pasar kaget di wilayah perbatasan dua komunitas yang bertikai.

Konsekuensi logis yang selalu dipikirkan oleh seorang perempuan (terutama ibu) ketika konflik berlangsung adalah bagaimana tetap menghidupi keluarga dalam kondisi darurat dan serba terbatas. Kelangkaan bahan makanan bagi keluarga adalah persoalan serius yang menjadi beban utama seorang perempuan di saat semua laki-laki dewasa (suami atau anak) harus berada selama berhari-hari di lokasi konflik. Kalaupun ada, laki-laki biasanya dilarang ke luar rumah. Ada semacam anggapan umum bahwa perempuan relatif lebih "aman bergerak" jika situasi konflik berlangsung: mungkin disebabkan perempuan tidak terlibat langsung dalam kontak fisik dengan pihak lawan.

Walaupun konflik tengah berlangsung, masih ada wilayah atau desa-desa tertentu yang tetap menjalankan aktivitas produksi misalnya nelayan dan bertani. Di Pulau Ambon dan Lease, ada desa-desa tertentu yang sudah diketahui sebagai penghasil ikan ataupun sayur dan umbi-umbian. Di desa-desa di bagian timur laut Pulau Ambon, yang lebih dikenal dengan sebutan Jazirah Leihitu adalah pemasok ikan segar terbesar bagi masyarakat di kota Ambon ketika konflik sedang berlangsung. Rata-rata desa di Jazirah ter-



Kegiatan ibu-ibu di Pasar Tulehu, Ambon

sebut adalah desa Islam. Dengan mempergunakan transportasi laut, hasil tangkapan nelayan Leihitu didistribusikan ke Kota Ambon. Para pedagang *papalele* (pedagang eceran) yang sebagian besar adalah perempuan dari dua komunitas sudah menunggu di lokasi-lokasi

pembongkaran, misalnya di pantai Mardika. Bila lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya transaksi, maka pedagang Muslim akan menampung semua hasil tangkapan di lokasi pembongkaran dan selanjutnya menemui rekan dagangnya yang Kristen di lokasi-lokasi yang sudah disepakati sebelumnya.

Lokasi di depan Hotel Amans (dekat pasar Mardika), Tugu Trikora (depan Gereja Silo), PGSD (depan Rumah Sakit Tentara), Air Salobar (lokasi pohon Mangga), Jembatan Galala, Lantamal Halong, Secata B-Suli, adalah lokasi transaksi favorit antara para pedagang Muslim-Nasrani sepanjang konflik berlangsung. Sebaliknya, jika nelayan dari Desa Galala (Kristen) yang melakukan pembongkaran hasil tangkap maka ibu-ibu *papalele* dari dua komunitas akan melakukan hal yang sama. Maka tidaklah heran, walaupun bertikai tetapi masyarakat di Desa Kudamati atau Karang Panjang –yang Kristen- mengetahui dengan persis bahwa hidangan makan siang dengan lauk ikan cakalang adalah hasil tangkap nelayan Leihitu -yang muslim-. Hal yang sama terjadi dengan jenis bahan makanan lain seperti sayuran yang dipasarkan oleh masyarakat Desa Passo (Kristen) di Kota Ambon. Dengan mempergunakan lokasi-lokasi yang sama para pedagang sayur dari dua komunitas melakukan transaksi.

Melalui ibu-ibu *papalele* inilah, secara berangsur-angsur mulai terjalin lagi hubungan antar masyarakat Nasrani dan Muslim yang terputus selama konflik berlangsung. Proses ini terjadi secara spontan dan sangat alamiah. Harga seekor ikan atau seikat kangkung di pasar kaget Nasrani, seperti di batu Gantung atau di Mardika, tiga kali lipat dari harga yang berlaku di pasar-pasar perbatasan yang ditawarkan oleh ibu-ibu *papalele* yang muslim. Otomatis, sebagian besar pembeli nasrani lebih memilih membelanjakan uangnya di pasar-pasar kaget di perbatasan. Sejak itu, diperkuat dengan perjanjian Malino yang mengikat pihak militer, terjadi interaksi di masyarakat Maluku antara dua komunitas (Islam Kristen) atas dasar saling membutuhkan. Mereka saling introspeksi kondisi masing-masing, berpelukan, menangis dan saling menanyakan kondisi keluarga, kenalan atau tetangganya yang berpencar-pencar.

Kepulauan Kei di Maluku Tenggara: Perempuan sebagai Rekonsiliator dan Pencegah Konflik Baru

Wilayah pertama di Propinsi Maluku yang tidak terkena konflik dan

sangat menikmati ketenangan hingga berhentinya perang adalah Kepulauan Kei. Proses rekonsiliasi di Kepulauan Kei selain mempergunakan beberapa metode penyelesaian seperti yang diterapkan untuk pemulihan Maluku secara umum, kekuatan utama yang dipakai adalah nilai-nilai adat masyarakat setempat yang nisbi lebih kuat diyakini dan dipraktekkan dalam kehidupan keseharian mereka.

Dalam masyarakat setempat, perempuan Kei memiliki kedudukan istimewa. Sebagai contoh, ketika konflik sedang berlangsung, kaum perempuan dan ibu-ibu dari Desa Kolser (Kristen) menyeberangi laut, melewati pulau-pulau menuju ke lokasi pengungsian saudaranya yang beragama Islam di Desa Dian, Pulau Selayar, Ut, Tamedan dan Ngadi sekadar membawa bantuan makanan dan pakaian. Padahal rute yang ditempuh dikenal sangat berbahaya untuk dilintasi saat itu, baik Muslim ataupun Kristen. Mengapa mereka tidak terancam? Bukankah kelompok perempuan itu beragama Kristen yang adalah musuh saat itu?

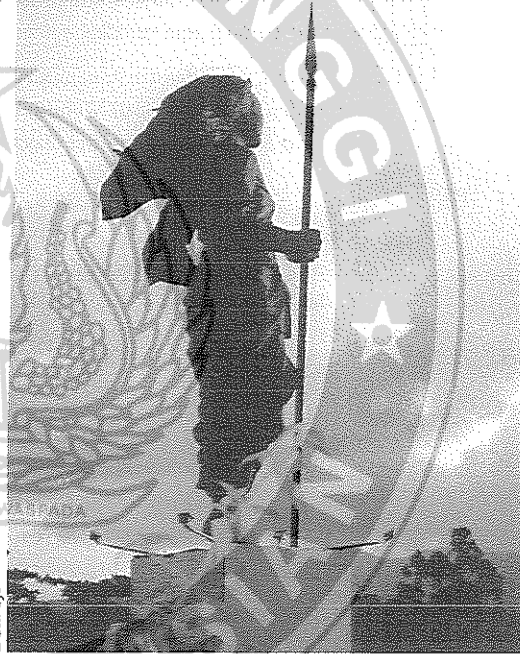
Di sinilah letak keistimewaan hukum adat Kei, Larvul Ngabal, yang secara filosofi menempatkan perempuan sebagai "yang wajib dihormati". *Morjain fo mahiling* (tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan) adalah salah satu filsafat hidup orang Kei yang menjadi dasar utama perlakuan terhadap perempuan.

Seperti yang dipaparkan oleh Hans Wamir, direktur Yayasan Nen Mas II, dalam tulisan buku kumpulan makalahnya yang berjudul *Mencoba Memadamkan Sumber Api*, terbitan PPSW-Jakarta, bahwa TRK-Jaringan Baileo Maluku di Kei, Maluku Tenggara, "memanfaatkan" kaum perempuan terutama para ibu untuk memperlancar proses-proses rekonsiliasi yang sedang berjalan. Dalam adat Kei, ibu atau saudara perempuan memiliki kedudukan sangat khas dan khusus. Salah satu diktum pokok adat Kei bahwa orang Kei akan berperang karena dua hal; pertama batas tanah yang dilanggar dan kedua adalah kehormatan saudara perempuan yang dinodai. Keputusan akhir untuk mencanangkan tanda sasi atau *hawear* (tanda menyatakan suatu larangan adat tertentu) ada pada ibu dan kaum perempuan, meskipun yang melaksanakannya nanti adalah para laki-laki. Kaum ibu pulalah yang menentukan (dan memang paling mengetahui) sejarah hubungan-hubungan darah dan kekerabatan antar berbagai desa dan kampung di

seluruh Kei. Selanjutnya atas beberapa petunjuk teknis dari para tetua adat, para anggota TRK mengorganisir "brigade ibu-ibu" ini untuk mulai membuka 'saluran-saluran diplomasi', terutama antar beberapa desa dan kampung yang memang menjadi pusat konflik. Tunduk pada adat, tak ada seorang pun yang berani mengusik manuver kaum ibu ini.

Muara dari manuver kaum perempuan inilah upaya-upaya rekonsiliasi yang lebih terorganisir mulai dilakukan. Pertemuan-pertemuan adat oleh para tetua di tiap desa atau kawasan (*ratschaap*) berlangsung dengan lancar. Bila ada pihak yang tidak sepakat dengan proses damai yang sedang berlangsung, kaum perempuan Kei tidak segan-segan "pasang badan", berdiri di depan menghadapi kelompok tersebut.

Pada kerusuhan "jilid dua", yang masih diwarnai dengan isu agama, hampir saja terjadi ketika proses pemilihan Bupati Maluku Tenggara baru-baru ini. Yang menengangkannya adalah kelompok ibu-ibu dan perempuan muda dengan cara membangun tenda di Jembatan Watdek yang menghubungkan Pulau Dullah dengan Pulau Kei Kecil. Mereka memasang *hawear* dan berkemah selama sebulan. Memang tindakan tersebut sangat sarat politik kala itu, tetapi satu hal yang pasti, tidak seorangpun yang berani memindahkan mereka dari tempat itu hingga ada negosiasi lanjutan untuk mencari jalan keluar terbaik. Mengusir kelompok tersebut dari tempatnya sama halnya menciptakan kerusuhan kedua. *Morjain fo mahiling...!!!*



Patung Kristina Martha Tiahahu, simbol pahlawan perempuan Maluku

Catatan Belakang

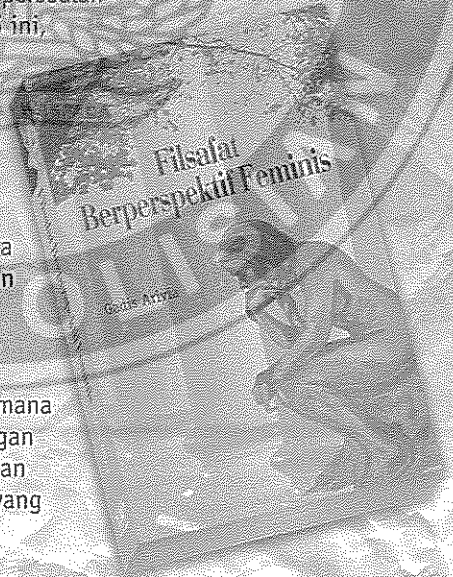
1. Di Maluku, seorang pendeta sangat disegani dan didengar oleh masyarakat, baik Kristen ataupun muslim. Mereka adalah pemimpin.
2. Hukum Sasi atau Hawear menempatkan perempuan sebagai amsal yang memiliki makna tentang penghormatan kepada perempuan.
3. Ketidakwa-jaran ini diakui oleh semua orang yang mengetahui dengan persis “ritual” tiap tahun antara pemuda Mardika dan Batu Merah, karena tanpa tindakan pelemparan ataupun pembakaran rumah.
4. Ade Latifa, *Pemulangan Pengungsi dari Provinsi Sulawesi Utara ke Provinsi Maluku Utara dalam Pengungsi di Maluku Utara dan Sulawesi Utara Upaya Penanganan Menuju Kehidupan Mandiri* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan LIPI, 2003)
5. Mita Noveria, *op.cit.*, 2003.
6. Karen Campbell-Nelson, dkk; **Perempuan di bawah Laki-laki yang Kalah; Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat** (Jakarta: Penerbit JKPIIT dan Yayasan PIKUL, 2001).
7. *Ibid.*
8. *Ibid.*
9. Catatan dari redaksi. Seperti dalam wawancara Jurnal Perempuan bulan Oktober dengan Pendam Prebska Pendam XVI/Patimura bernama Mayor Infantri Paiman di Ambon mengatakan bahwa masalah KORAMIL ini prajurit TNI dianggap melakukan perbuatan ‘asusila’ berarti melanggar sumpah prajurit yang berisi “menjunjung tinggi kehormatan perempuan”. Perbuatan ini memiliki sanksi yang berat, seperti yang dilakukan oleh seorang prajurit di batalyon 731, dan kasus ini sudah dalam proses hukum meskipun belum diketahui keputusannya.
10. Kalimat lain yang sangat populer di Ambon adalah, “Ransel belakang pulang, lalu ransel depan menangis”. Kalimat ini merupakan ekspresi masyarakat ketika melihat peristiwa dramatik yang selalu terjadi ketika pelepasan satuan militer tertentu di pelabuhan Angkatan laut Halong-Ambon. Banyak perempuan muda (rata-rata berusia 17-24 thn) dalam kondisi hamil menangis bahkan pingsan ketika melepaskan kepergian kekasih militernya di pelabuhan.
11. Disarikan dari makalah Lely Imoliana *Dendang Tifa Elit Politik & Militer, Konflik Sosial di Ambon dan Lease* dan Lela Suad *Krisis Jati Diri: Pemicu Konflik Sosial di Maluku* dalam kumpulan tulisannya, **Mencoba Memadamkan Sumber Api, Pengalaman Menangani Sebab, Akibat dan Dampak Konflik Sosial di Beberapa Daerah di Indonesia**, Penyunting Zulminarni & Topatimasang, eds, PPSW-ASBAE-IJZ DVV (Jakarta: Penerbit PPSW, 2003).

TELAH TERBIT!!

Filsafat Berperspektif Feminis

Karya Gadis Arivia

Buku ini mengeksplorasi persoalan-persoalan filsafat dan feminisme. Di dalam eksplorasi ini, penulis menunjukkan dominasi pemikiran maskulin di dalam Filsafat Barat. Sebanyak 14 filsuf terkenal diteliti mulai dari filsuf-filsuf Yunani hingga filsuf-filsuf kontemporer dalam teks-teks filosofis mereka tentang perempuan. Temuan-temuan yang dicapai adalah bahwa kebanyakan filsuf meminggirkan perempuan dalam *mainstream* filsafat dan tidak memberikan ruang bagi pemikiran feminis. Penulis menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk memperlihatkan bagaimana cara berpikir maskulin beroperasi dan dengan pendekatan yang sama berhasil menyuarakan filsuf-filsuf perempuan dengan cara baca yang baru.



**Untuk informasi lebih lanjut Hubungi
Marketing Yayasan Jurnal Perempuan**

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810

